

PEMBINAAN CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rosmala dan Isril

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Camat Guidance In The Implementation Of The Village. This study aims to determine the form of development in the district and village government organization examines the factors inhibiting development in the organization of the village government district in Rokan IV Koto District Rokan Hulu. This study used qualitative methods, informants are determined based on the subjects that mastered the problem, have the data and are willing to provide complete and accurate information, location were taken in the Rokan IV Koto District Rokan Hulu. For a limited time given, the authors take the 2 villages as the study site Rokan Koto Ruang village and the village of Tanjung Medan areas. Collecting data in this study ditriangulasikan by using and combining more than one different data collection techniques for the validity of the data obtained. The results showed that in fact based on the results of research conducted less effective coaching. Shape coaching conducted by the Village Head in governance including; coaching village administration, coaching against village officials (HR), and implementing education and training (Training) of the village administration. Factors inhibiting such development, dissemination of regulations and administrative villages are still lacking, the current administration was limited to administrators, other factors affecting the lack of resources for the development of village officials, so that the village head had difficulty in doing coaching.

Abstrak: Pembinaan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pembinaan Camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa dan faktor-faktor penghambat pembinaan camat dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Pengumpulan data dalam penelitian ini ditriangulasikan dengan menggunakan dan mengkombinasikan lebih dari satu teknik pengumpulan data yang berbeda demi keabsahan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kenyataannya berdasarkan hasil penelitian pembinaan yang dilakukan kurang efektif. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan terhadap aparatur desa (SDM), dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) tentang administrasi desa. Faktor menghambat seperti pembangunan, penyebaran peraturan dan administrasi masih kurang, desa arus administrasi itu terbatas pada administrator, faktor lain yang mempengaruhi kurangnya sumber daya untuk pengembangan desa pejabat, sehingga desa kepala mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan.

Kata Kunci: administrasi desa, pembinaan camat, penyelenggaraan pemerintah desa

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, keberadaan camat merupakan perangkat daerah bukan lagi sebagai kepala wilayah. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala wilayah adalah kewenangan atributif, dengan kata lain sebagai perangkat daerah camat bertugas melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang dilimpahkan kepala daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2008 pada pasal 15 ayat (1) disebutkan

bahwa camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang pada point (f) menyatakan bahwa “camat membina penyelenggaraan pemerintahan desa”. Pembinaan yang dilakukan oleh camat pada pemerintahan desa tersebut mengarah kepada pembinaan administrasi pemerintahan desa. Program-program pembinaan yang dilakukan oleh camat meliputi berbagai macam aspek, namun lebih dikhususkan pada tiga kegiatan utama. *Pertama*, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tertib administrasi pemerintahan desa yang ada. *Kedua*, memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi

pelaksanaan administrasi desa. *Ketiga*, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, perangkat desa dan melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di tingkat kecamatan kepada Bupati.

Dari ketiga pengelompokan pembinaan pemerintahan desa yang ada di atas, ditemukan beberapa fenomena yang menyangkut pembinaan terhadap desa di Desa Rokan Koto Ruang dan Desa Tanjung Medan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Pada dua desa ini pelatihan mengenai administrasi desa belum sepenuhnya dilaksanakan. Pelayanan aparatur perangkat desa dalam administrasi desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

Buku Registrasi yang ada pada tiap-tiap desa belum terisi semua, terbukti pada Desa Tanjung Medan dari 17 buku registrasi yang ada hanya 8 buah buku yang lengkap. Buku registrasi tersebut hanya buku yang berkaitan dengan data penduduk, mutasi penduduk, sedangkan registrasi administrasi keuangan desa belum dapat dikatakan lengkap. Juga masih banyak perangkat desa di dua desa yang belum mengetahui peraturan-peraturan desa (Perdes) yang terbaru. Perangkat desa belum cakap dan terampil dalam menjalankan administrasi pemerintahan desa terutama dalam hal memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan pengurusan KTP, KK, dan pengurusan izin-izin lainnya.

Ndraha (2003) menyatakan fungsi pemerintahan yang kemudian diringkas menjadi dua macam fungsi. *Pertama*, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk layanan birokrasi. *Kedua*, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (*empowerment*), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan begitu luas dan kompleksnya tugas dan fungsi pemerintahan, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar.

Pemerintah desa sebagai organisasi tidak lepas dari keharusan melaksanakan proses administrasi dalam rangka mengatur dan mengurus

urusan rumah tangganya. Pelaksanaan administrasi desa merupakan kegiatan-kegiatan penunjang pemerintah desa dalam kaitan tugas dan kewenangannya, yaitu meliputi pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat di tingkat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penulis mengambil dua lokasi desa sebagai lokasi penelitian secara intensif, yaitu desa Rokan Koto Ruang dan Desa Tanjung Medan. Pemilihan informasi sebagai sumber data atau informan dalam penelitian ini berdasarkan asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi harus memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai narasumber (*key informan*) dalam penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan sudi kasus serta wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu studi kepustakaan, wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembinaan Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pelayanan administrasi pemerintahan desa

Administrasi pemerintahan desa merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai aktivitas pemerintah desa dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang, yaitu menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan urusan-urusan desa, pemerintah desa berkewajiban melakukan berbagai pencatatan data dan informasi pada buku-buku register/model sesuai dengan urusan dan kepentingannya. Kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penduduk dan mutasi penduduk pada Buku Administrasi Penduduk dimanfaatkan untuk menentukan penduduk yang datang dan pindah dari dan sebaliknya yang masuk ke desa.

Pendidikan dan pelatihan administrasi desa

Pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa dilakukan oleh seluruh supra desa. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota dan camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan pemerintahan kepada desa mencakup banyak hal antara lain:

1. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.
2. Memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota kepada desa
3. Memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan
4. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif dan lain sebagainya hingga melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan (pasal 99)

Berdasarkan pantauan ternyata kelengkapan lembaga pemerintahannya cukup terpenuhi. Lembaga pemerintahan yang ada meliputi Sekdes, BPD, dan LKMD terpenuhi dengan baik.

Pedoman teknis administratif perencanaan pembangunan desa

Pembangunan desa ditujukan untuk segenap masyarakat. Dengan demikian pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat desa. Pembangunan desa bukanlah terfokus dalam satu bidang saja, akan tetapi harus seimbang, serasi, dan mencakup segala bidang. Jelasnya dikatakan bahwa keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong-royong.

Program pembangunan desa-desa yang ada di Kecamatan Rokan IV Koto hanya sebatas pengusulan kepada camat, dan pihak kecamatan

yang akan mengajukan pada Badan Perencanaan Pembangunan (Bappelitbang) untuk disahkan oleh lembaga legislatif.

Pembangunan desa dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan. Partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan tersebut diwujudkan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan program pembinaan Kesejahteraan Keluarga.

Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti pertama sebagai metode pembangunan masyarakat sebagai subyek pembangunan; kedua sebagai program dan ketiga sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dilandasi oleh kesadaran untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Faktor yang Menghambat Upaya Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Upaya camat dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dianalisis melalui konsep teori Edward III (1980), yaitu:

Komunikasi

Komunikasi bagi masyarakat di Kecamatan Rokan IV Koto sangat dibutuhkan meskipun Kecamatan Rokan IV Koto masih tergolong daerah yang sulit dijangkau. Disamping itu faktor pendidikan yang masih tergolong rendah dan faktor ekonomi yang sulit juga sangat berpengaruh. Oleh sebab itu, camat sebagai kepala pemerintahan ditingkat kecamatan harus lebih banyak turun kelapangan untuk berdialog dengan masyarakat.

Disadari bersama bahwa dengan komunikasi yang aktif antara pemimpin pemerintah dengan masyarakat paling tidak dapat membangun kesadaran masyarakat, sehingga masyarakat menjadi masyarakat yang aktif. Etzioni

dalam Ndraha (1987) mengatakan konsep masyarakat yang aktif, yaitu masyarakat yang mampu menguasai dan mengendalikan masyarakat mereka sendiri. Kebalikannya adalah masyarakat pasif, yaitu masyarakat yang dikehendaki oleh kekuatan dari luar masyarakat yang bersangkutan. Friedmann dalam Ndraha (1987) mengemukakan menjadi komunitas aktif, sekaligus memperluas konteksnya ke bidang politik pembangunan. Komunitas aktif adalah komunitas yang mampu memperjuangkan kepentingannya melalui proses politik. Komunitas aktif adalah masyarakat aktif dan mengorganisasikan energinya menjadi suatu gerakan (*movement*) yang efektif.

Fungsi komunikasi dilakukan antara aparat yang membina misalnya kepala desa dan yang dibina diantaranya perangkat desa dan pamong desa. Pembinaan diupayakan dilakukan dua arah antara yang pembina dan yang dibina agar ditemukan titik temu antara kedua belah pihak. Camat dalam kepemimpinannya sudah cukup baik, namun kadangkala sibuk dengan urusan yang bersifat kedinasan. Camat tentunya punya bawahan kepala seksi yang membidangi seksi masing-masing, namun dalam praktik di lapangan bawahan camat juga kurang memahami tugas pokoknya dalam pembinaan terhadap kepala desa dan komunikasi yang terjadi kurang berjalan dengan baik

Sumber daya

Kepala desa kurang memfungsikan bawahannya secara maksimal. Masukan, saran-saran, dan ide-ide dari perangkat desa yang ada pun jarang ditanggapi walaupun disampaikan pada saat rapat formal kedinasan. Pendapat-pendapat mereka jarang yang ditanggapi. Padahal mungkin banyak saran-saran ide dan gagasan yang baik dan membantu pencapaian tugasnya, namun tak pernah dipedulikan. Singkatnya kepala desa sebagai kepala organisasi pemerintah desa kurang memfungsikan dan memberdayakan stafnya dan cenderung otoriter dalam memimpin desa.

Kaloh (2003) mengatakan, bahwasannya pemimpin yang dapat memberdayakan organisasi adalah pemimpin yang memahami secara utuh

keberadaan staf, mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikemukakan dan diinginkan bawahan, bersedia menjelaskan secara rinci tujuan yang ingin dicapai, memberi kesempatan kepada staf untuk berkembang dan bersedia berfikir kritis.

Apabila dihubungkan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 dimana tugas kepala desa cukup berat dan sangat kompleks maka tindakan dan sikap kepala desa yang lebih banyak waktu luang tersebut kurang efisien. Seharusnya waktu luang dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk yang bermanfaat bagi kepemimpinannya seperti berdiskusi dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat, berkonsultasi dengan BPD sehingga banyak manfaatnya untuk kepentingan masyarakat desa.

Memang sangat dibutuhkan pendidikan dan pelatihan mengenai administrasi desa dalam rangka kelengkapan administrasi yang baik di tingkat desa. Hal ini sangat relevan mengingat beban kerja bagi aparatur desa sangat banyak untuk itu peningkatan keterampilan sumber daya aparatur yang ada di sekretariat memang sangat diperlukan.

Disposisi

Pembinaan yang dilakukan camat kurang dapat mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan yang terbaru dengan baik. Camat dalam sering terlambat, malahan sering kepala desa memperoleh informasi dari teman sesama pada saat ada acara di kabupaten. Camat seringkali meninggalkan tempat dengan alasan urusan di tingkat kabupaten yang tidak bisa ditinggalkan. Yuki dalam Kaloh (2003) mengatakan, sebagai pemimpin adalah orang yang bergerak lebih awal, mempelopori, menggerakkan pikiran dan pendapat anggota organisasi, membimbing, menuntun dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya, menetapkan tujuan organisasi, memotivasi anggota organisasi agar sesuai dengan tujuan organisasi.

Camat kurang dapat bersosialisasi dengan masyarakat di desa, sehingga informasi yang di-

terima seringkali terlambat sampai di tingkat desa. Faktor lain yang mempengaruhi ketidakberhasilan kepala desa sebagai kepala pemerintahan adalah kebanyakan kepala desa yang ada kurang memelihara hubungan dengan tokoh adat, tokoh agama yang ada, sehingga koordinasi dan komunikasi kepala desa dan tokoh masyarakat kurang lancar. Kepemimpinan kepala desa tidak transparan dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Struktur birokrasi

Kinerja kepala desa kurang berjalan dengan baik. Kepala desa jarang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pengurus BPD. Hubungannya berjalan kurang harmonis. Hal ini juga dikarenakan pengurus BPD dianggap sebagai saingan dan selalu mengontrol dan mengawasi kinerja para aparatur desa. Namun demikian BPD tetap menjalankan tugas sebagai mana biasanya sebagai lembaga legislasi di samping itu tetap memonitor kepala desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang ada tentunya.

Semenjak adanya BPD sering terjadi ketegangan hubungan antara BPD dan kepala desa. Hubungan BPD dan kepala desa boleh dikatakan kurang harmonis, koordinasi, komunikasi lemah, sering terjadi kesalahpahaman, perbedaan pandangan dan konflik. Konflik yang terjadi misalnya dalam hal penetapan Peraturan Desa (Perdes).

Struktur pemerintahan yang ada dalam memberdayakan aparatur kecamatan sudah dapat dikatakan baik, namun dalam pelaksanaan peranan masing-masing seksi yang ada kurang terlaksana dengan baik. Masing-masing seksi telah bekerja dengan baik, namun ada kalanya dalam pelaksanaan kerja masih ada pekerjaan yang tumpang tindih antara seksi.

Aparatur desa yang ada kurang dapat memfungsikan dirinya sebagai aparat desa. Mereka lebih banyak mengerjakan tugas-tugas di luar fungsinya utama sebagai perangkat desa. Mereka banyak mencari pekerjaan diluar dari tugas pokoknya sebagai perangkat desa.

SIMPULAN

Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan terhadap aparatur desa, dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang administrasi desa serta pembinaan dalam hal teknis administratif perencanaan pembangunan desa. Namun pada kenyataannya pembinaan yang dilakukan kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, sosialisasi mengenai peraturan desa dan administrasi pemerintahan desa yang masih kurang, akibatnya penerapan peraturan baru sulit untuk ditrapkan dengan cepat ditingkat desa. *Kedua*, pemerintahan yang ada saat ini hanya sebatas pelaksana administrasi, hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya yang bersifat teknis. *Ketiga*, faktor lain yang mempengaruhi yaitu kurangnya sumber dana pembinaan bagi aparatur desa, sehingga kepala desa mengalami kesulitan dalam melakukan pembinaan.

DAFTAR RUJUKAN

- Syaffie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*. Jakarta: Bumi Aksara
- Indrawijaya, Adam, 2002. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Komorotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik Sketsa Pada Masa Transisi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miftah, Thoha, 2005. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pamudji. 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saparin, Sumber. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subarsono, A.G., 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Todaro, M.P., 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga

Triguno. 2000. *Budaya Kerja*. Jakarta: Golden Trayon Press.

Wasistiono, Sadu, 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Bandung: Fokus Media

Wasistiono, Sadu, dkk, 2003. *Perkembangan Organisasi Kecamatan dari Masa ke Masa*. Bandung: Fokusmedia

Widodo, 2001. *Adminidtrasi Publik dan Implementasinya*. Bandung: RefikaAditama